

Kredit Melaju, UMKM Tertinggal

Brief Update

Digital Economy and Small and Medium Enterprises (SMEs)

Izzudin Al Farras

Head of Center

Fadhila Maulida

Researcher

Nur Komaria

Researcher

Pidah Febriyanti

Research Assistant

Jodhie Marshal Pambudi Sinaga

Research Assistant

INDEF / *Institute for Development
of Economics and Finance*

Center of Digital Economy and SMEs (CODES)

- Daya beli melemah sejak awal 2026, tercermin dari menurunnya angka pada Indeks Keyakinan Konsumen dan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil, di tengah kenaikan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 yang berlawanan arah dengan tren suku bunga global. Kenaikan ini berisiko menekan lebih jauh permintaan domestik dan biaya kredit bagi UMKM.
- Pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat dari 10,3% pada Januari 2025 menjadi 12,7% pada Juni 2026, tetapi tidak dinikmati secara merata oleh UMKM. Rasio rekening kredit UMKM terhadap total rekening kredit juga turun 13% dalam 18 bulan dan porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya 17,03% pada Juni 2026, seiring preferensi bank yang lebih memilih segmen korporasi akibat NPL UMKM yang lebih tinggi.
- *Fintech P2P lending* (pindar) tumbuh solid dari sisi *outstanding* pembiayaan (+23% sepanjang 2025), namun diiringi memburuknya kualitas kredit, dengan TWP-90 melonjak menjadi 4,32% pada akhir 2025. Orientasi penyaluran juga makin bergeser ke sektor konsumtif (82%), sehingga mengurangi peran *P2P lending* sebagai instrumen pembiayaan produktif UMKM yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
- Maka, mengatasi tantangan pembiayaan UMKM memerlukan langkah simultan di empat sisi: perlunya insentif untuk memperluas penyaluran kredit bagi UMKM, penyederhanaan KUR agar lebih mudah diakses, penguatan tata kelola dan pengawasan kualitas kredit pindar, serta stimulus daya beli rumah tangga. Sebab, persoalan UMKM saat ini berakar pada lemahnya permintaan riil, bukan sekadar terbatasnya akses kredit.

1. Gambaran Umum Kondisi Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan, Inflasi, dan Daya Beli
2. Tren Kredit Bank terhadap UMKM
3. Tren Kredit *Fintech* P2P Lending
4. Isu Terkini

Ekonomi tumbuh 5,29% dan pengangguran turun, tetapi inflasi naik dan keyakinan konsumen justru melemah

INDEF

Angka makro agregat masih solid, tetapi sinyal dari sisi rumah tangga mulai berbeda arah - inilah latar yang membentuk permintaan kredit dan kualitas pembiayaan UMKM.

5,29%

Pertumbuhan ekonomi TW-II 2026
Melambat dari 5,61% pada TW-I

2,88%

Inflasi tahunan, Juli 2026
Naik dari 2,37% pada tahun lalu

4,68%

Pengangguran terbuka, Feb 2026
Turun 0,08 poin persentase (yoy)

Rp3,29 jt

Rata-rata upah buruh, Feb 2026
147,67 juta penduduk bekerja

5,75%

BI Rate, Agustus 2026
Naik 100 bps dibandingkan 3 bulan lalu

12,7%

Pertumbuhan kredit bank, Jun 2026
Kredit UMKM hanya 1,21%

KEY TAKEAWAYS

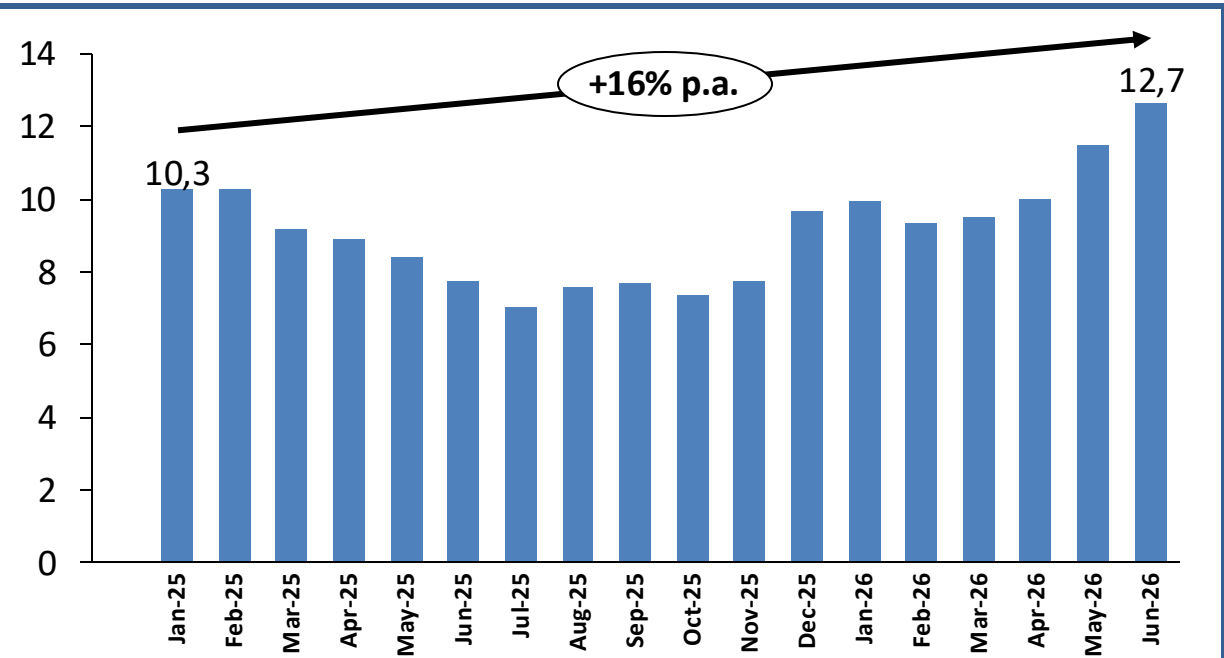
- Ekonomi tumbuh 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat dari 5,61% pada triwulan I. Perlambatan bersumber dari tekanan eksternal termasuk lonjakan harga minyak dunia sepanjang April-Juni mengganggu kinerja ekspor, dan pertambangan bahkan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi.
- Konsumsi rumah tangga tetap penopang terbesar PDB (sekitar 53%), sehingga setiap pelemahan daya beli langsung dapat terasa lebih cepat terhadap perlambatan laju pertumbuhan nasional.
- Inflasi tahunan naik ke 2,88% pada Juli 2026 dari 2,37% setahun lalu. Tekanan tidak hanya berasal dari pangan bergejolak, tetapi juga komponen yang lebih persisten: inflasi inti mencapai 2,76%, sedangkan harga yang diatur pemerintah naik 3,58%, terutama dipengaruhi bensin dan tarif angkutan udara.
- Pasar kerja stabil di permukaan: pengangguran terbuka 4,68% dengan 147,67 juta penduduk bekerja. Namun rata-rata upah buruh Rp3,29 juta per bulan, sehingga ruang kenaikan konsumsi riil tetap sempit saat harga naik 2,88%.
- Isu terkini: Bank Indonesia (BI) menahan BI Rate 5,75% tiga bulan beruntun setelah kenaikan 100 bps. Artinya, BI memilih menjaga stabilitas nilai tukar ketimbang mendorong permintaan domestik.

KESIMPULAN. Pertumbuhan agregat 5,29% tidak otomatis berarti daya beli menguat. Ketika inflasi naik lebih cepat daripada upah, pendapatan riil rumah tangga menipis. Hal tersebut tercermin pada pelemahan indeks keyakinan konsumen.

IMPLIKASI. Bagi UMKM, tekanan datang dari dua sisi sekaligus: omzet tertahan karena konsumen menahan belanja, sementara biaya kredit tetap mahal karena bunga acuan bertahan tinggi. Bagi pemerintah, stimulus akan lebih efektif bila diarahkan ke sisi permintaan rumah tangga daripada pelonggaran likuiditas perbankan yang belum tentu tersalurkan ke UMKM.

Kredit perbankan tetap ekspansif di 12,7% saat kenaikan BI Rate berlawanan arah dengan tren global

Pertumbuhan Kredit di Indonesia (%)

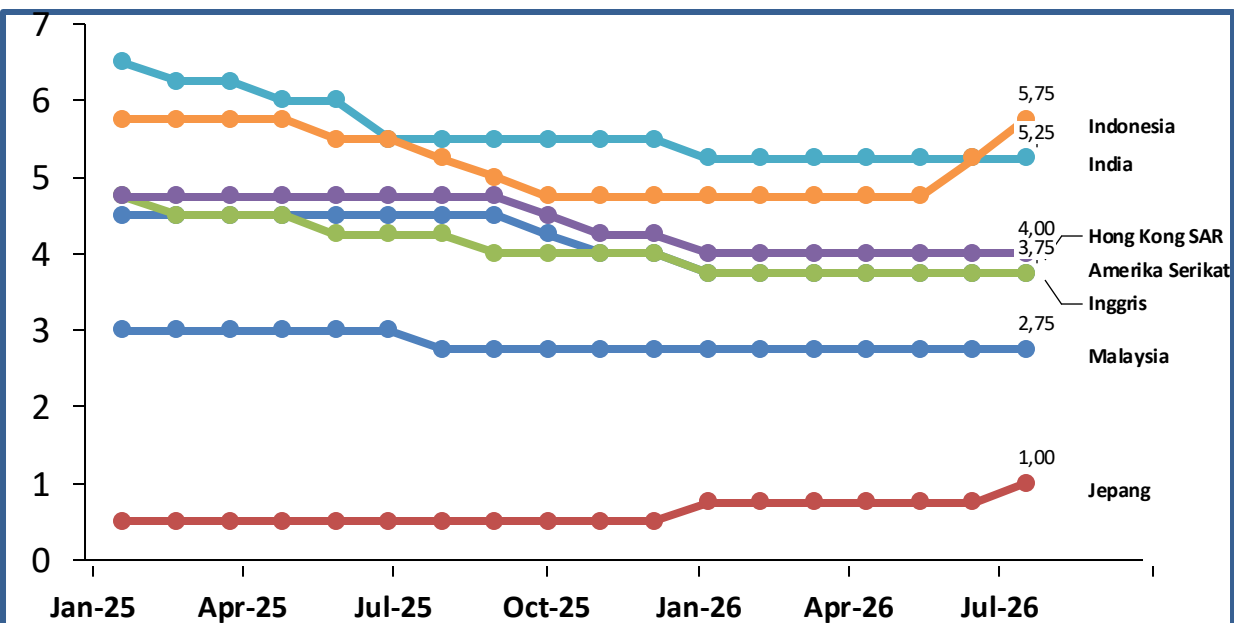


Permintaan kredit sedang kuat. Pertumbuhan kredit perbankan terakselerasi dari 10,3% (Januari 2025) menjadi 12,7% (Juni 2026), naik 2,4 poin persentase dalam 18 bulan.

Pendorongnya datang dari sisi permintaan: fasilitas pinjaman yang belum ditarik (*undisbursed loan*) mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon tersedia, pertanda pelaku usaha mulai merealisasikan rencana ekspansi yang sempat tertahan.

Namun, akselerasi itu tidak menyentuh UMKM. Pada periode yang sama, kredit UMKM hanya tumbuh 1,21%.

Tingkat Suku Bunga Beberapa Negara (Persen)



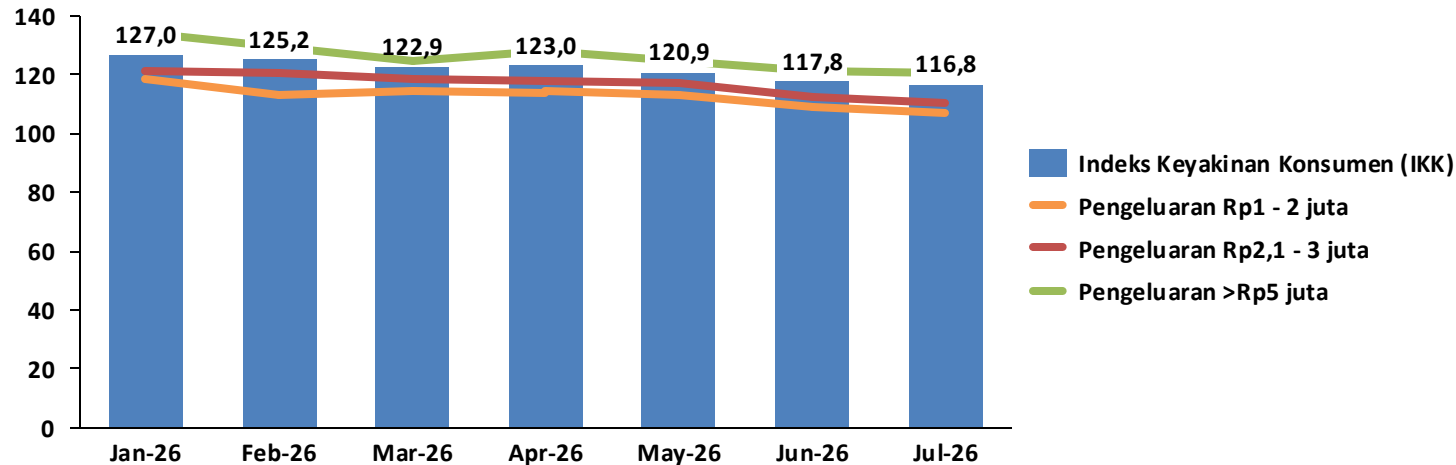
- Setelah melonggarkan bunga sepanjang 2025 hingga 4,75%, BI membalik arah dan mengembalikannya ke 5,75% pada Juni 2026 demi menstabilkan rupiah di tengah ketidakpastian global. Arah ini berbeda dengan mayoritas bank sentral yang menahan atau melonggarkan seperti Amerika Serikat pada level 3,75%
- Biaya dana perbankan tetap tinggi dan diteruskan ke bunga kredit justru ketika daya beli sedang melemah. Plafon Rp2.490 triliun yang belum ditarik menunjukkan ruang ekspansi sebenarnya tersedia tetapi realisasinya bergantung pada pulihnya permintaan, bukan pada turunnya bunga.

Di balik agregat yang tumbuh, daya beli melemah sejak awal 2026: IKK turun 10 poin dan pertumbuhan IPR turun hampir 5 poin persentase

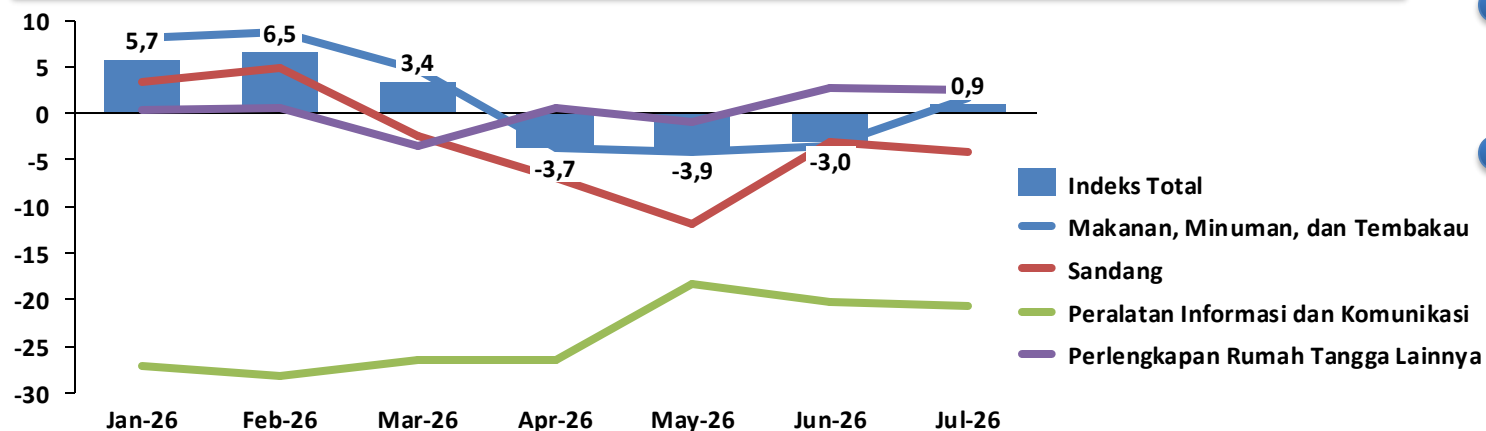
INDEF

Libur tahun baru, Ramadan, dan Lebaran seluruhnya jatuh pada paruh pertama 2026, sehingga penurunan IKK dan IPR pada periode ini merupakan anomali musiman yang berbanding terbalik dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Pelemahan yang menembus segmen atas dan komoditas pokok adalah sinyal awal risiko kemampuan bayar debitur.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)



Indeks Penjualan Riil (IPR)



Pelemahan daya beli di antaranya ditandai dari menurunnya angka pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun lebih dari 10 poin dan angka pada pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) turun hampir 5 poin persentase dari Januari ke Juli 2026

Pada IKK, penurunan keyakinan konsumen terjadi pada seluruh level pengeluaran masyarakat

Penurunan keyakinan konsumen paling signifikan terjadi pada masyarakat yang memiliki pengeluaran rumah tangga lebih dari Rp 5 juta per bulan

Adapun sektor dengan pertumbuhan penjualan riil yang menurun cukup drastis ada pada penjualan di sektor pakaian/sandang dan makanan, minuman, dan tembakau/pangan

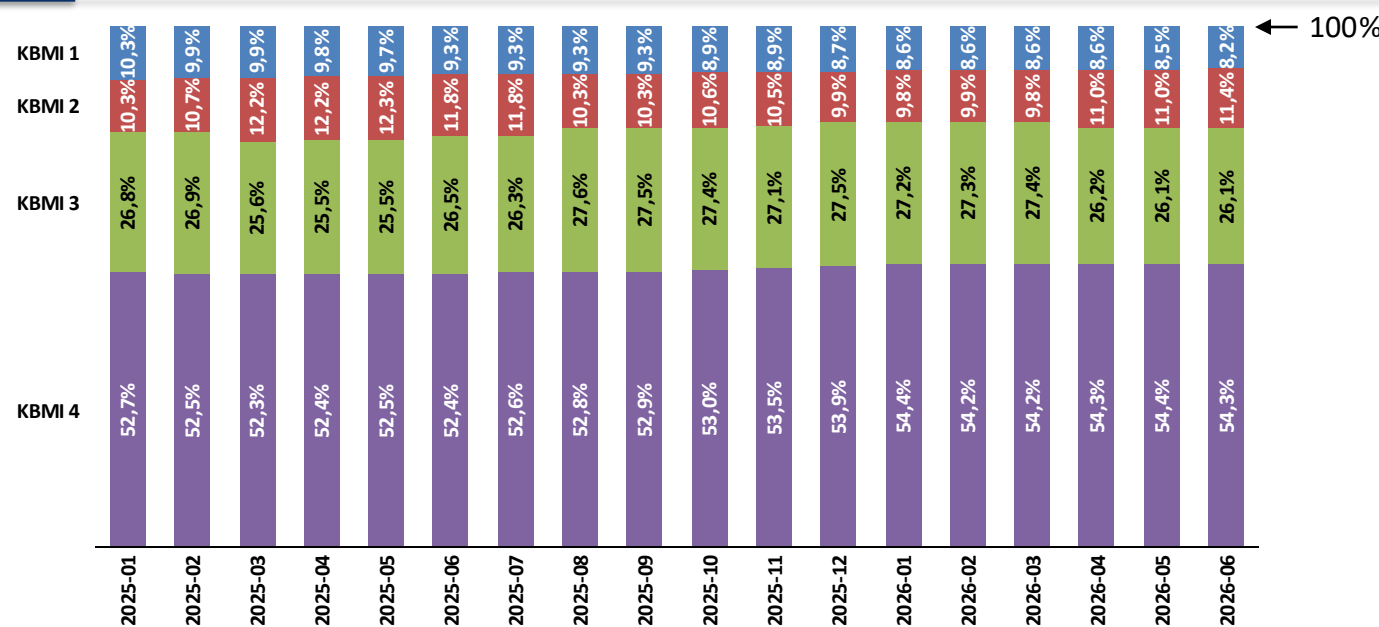
Pelemahan daya beli tersebut merupakan sinyal bagi kualitas kredit. Pemberi pinjaman perlu memperketat pemantauan kemampuan bayar sebelum tekanan muncul di angka kredit macet

Sumber: Bank Indonesia (2026)

Penyaluran kredit didominasi KBMI 4; UMKM lebih diarahkan ke skema komersial ketimbang KUR bersubsidi

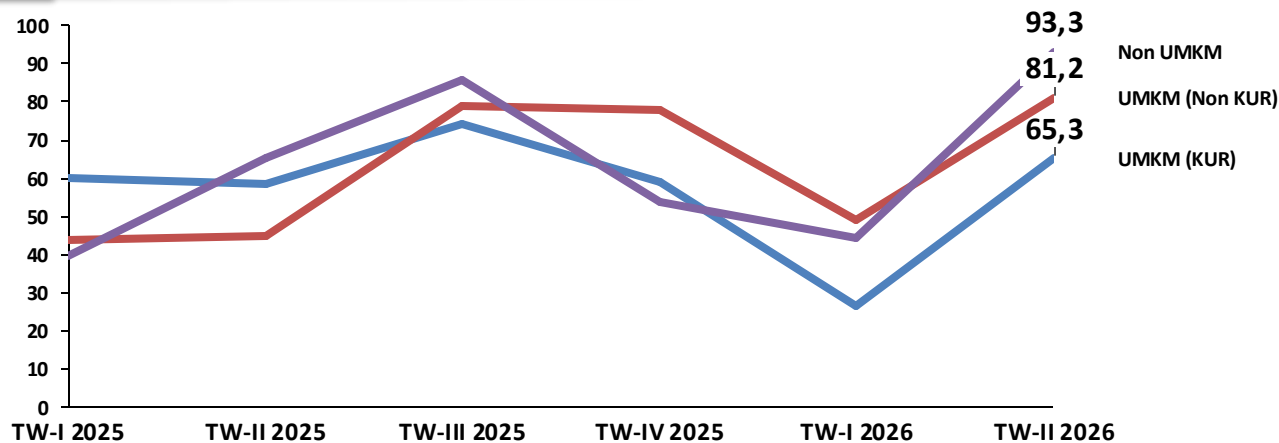
INDEF

Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (%)



- Penyaluran kredit masih terkonsentrasi di KBMI 4 (~54%), karena didukung oleh basis dana murah (CASA) yang lebih kuat sehingga kapasitas ekspansi kreditnya lebih besar dibanding kelompok bank lain.
- Konsentrasi ini krusial bagi UMKM karena bank kelompok menengah dan kecil yang secara historis lebih dekat ke segmen mikro, justru kehilangan pangsa.
- Dari sisi penyaluran kredit ke UMKM, permintaan kredit Non-KUR jauh lebih ekspansif dibandingkan UMKM KUR (65,3%). Kesenjangan ini terjadi terindikasi karena skema KUR terikat pada plafon dan kuota anggaran subsidi bunga pemerintah (Rp279 triliun pada 2026) sehingga penyalurannya dibatasi kapasitas fiskal negara, sementara skema komersial (Non-KUR) tidak terikat plafon anggaran dan bank bebas menetapkan bunga sesuai risiko pasar sehingga lebih leluasa dan cepat merespons permintaan kredit.
- Dari sisi UMKM, kecepatan akses modal kerja sering lebih menentukan daripada tingkat bunga. Artinya, subsidi murah kehilangan daya tarik bila pencairannya lambat. Maka, menyederhanakan syarat dan mempercepat pencairan KUR akan lebih efektif menaikkan serapan dibanding menambah subsidi bunga. Tanpa hal itu, anggaran subsidi berisiko tidak terserap sementara UMKM tetap membayar bunga komersial.

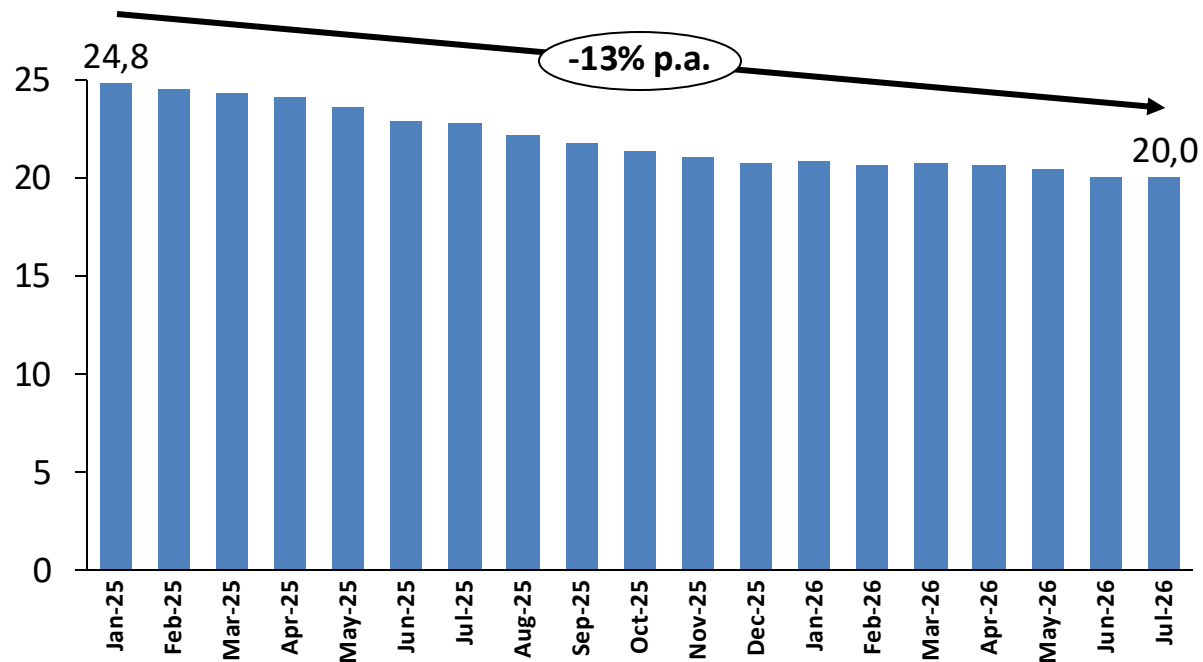
Penyaluran Kredit Berdasarkan Golongan Debitur per Triwulan (%)



Sumber: Bank Indonesia (2026)

Akses kredit UMKM terus tergerus, sementara strukturnya belum menunjukkan perubahan berarti

Rasio Rekening Kredit UMKM terhadap Total Rekening Kredit (%)



Proporsi Kredit UMKM (%)

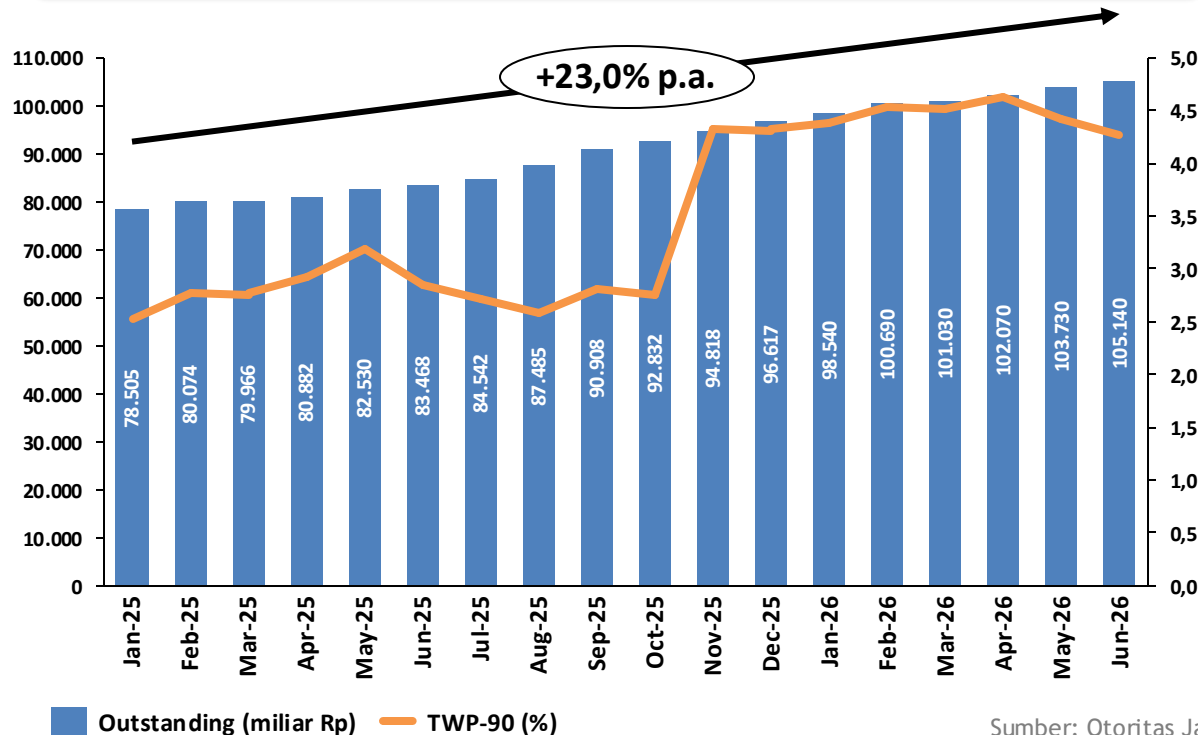


Sumber: Bank Indonesia (2026)

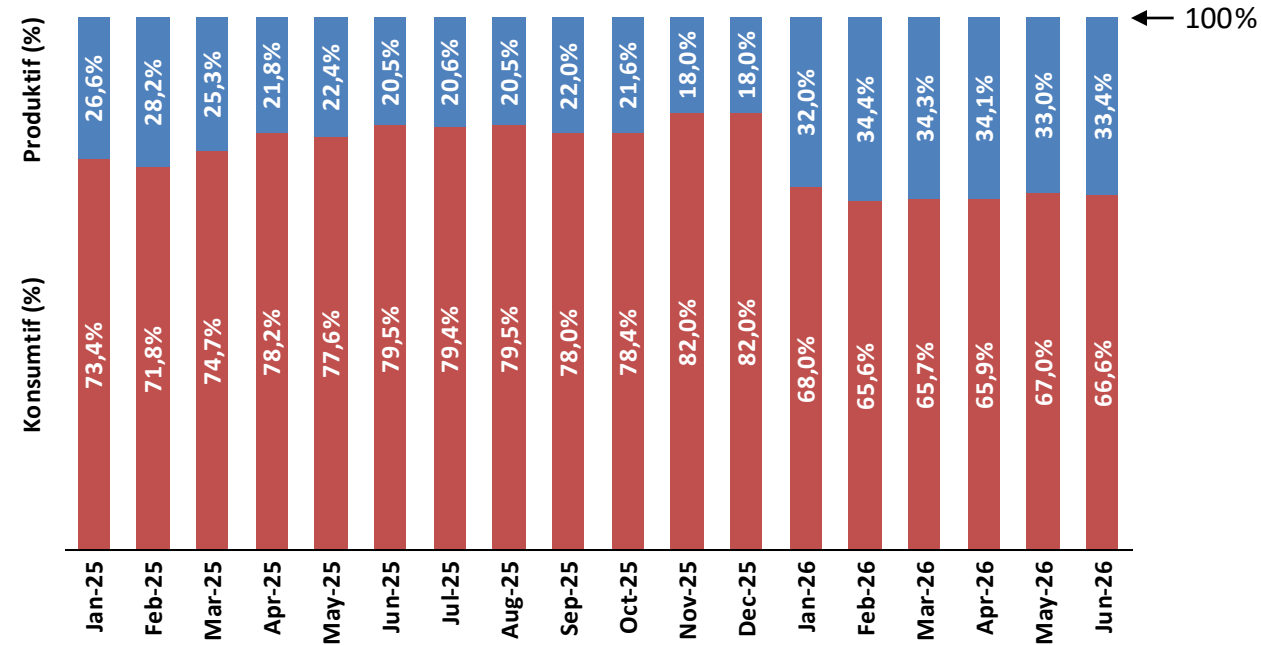
- Rasio rekening kredit UMKM terhadap total rekening kredit terus menurun, mengindikasikan bank yang semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke segmen ini. Kondisi ini turut diperberat oleh tekanan daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada omzet dan arus kas pelaku UMKM sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar kewajiban kredit.
- Di dalam komposisi kredit UMKM, segmen Mikro tetap konsisten mendominasi dibandingkan Kecil dan Menengah. Hal ini disebabkan usaha Mikro dinilai memiliki ketahanan yang lebih kokoh terhadap guncangan ekonomi, ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan, perputaran likuiditas masyarakat cenderung tetap bertahan di dalam ekosistem skala mikro. Meski demikian, ketahanan ini tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daya beli masyarakat secara luas

Pertumbuhan P2P lending masih berlanjut, namun meningkatnya risiko kredit turut menekan ekspansi pembiayaan ke sektor produktif

Tren Outstanding dan TWP-90 P2P Lending



Tren Penyaluran Fintech Sektor Produktif dan Konsumtif (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2026)

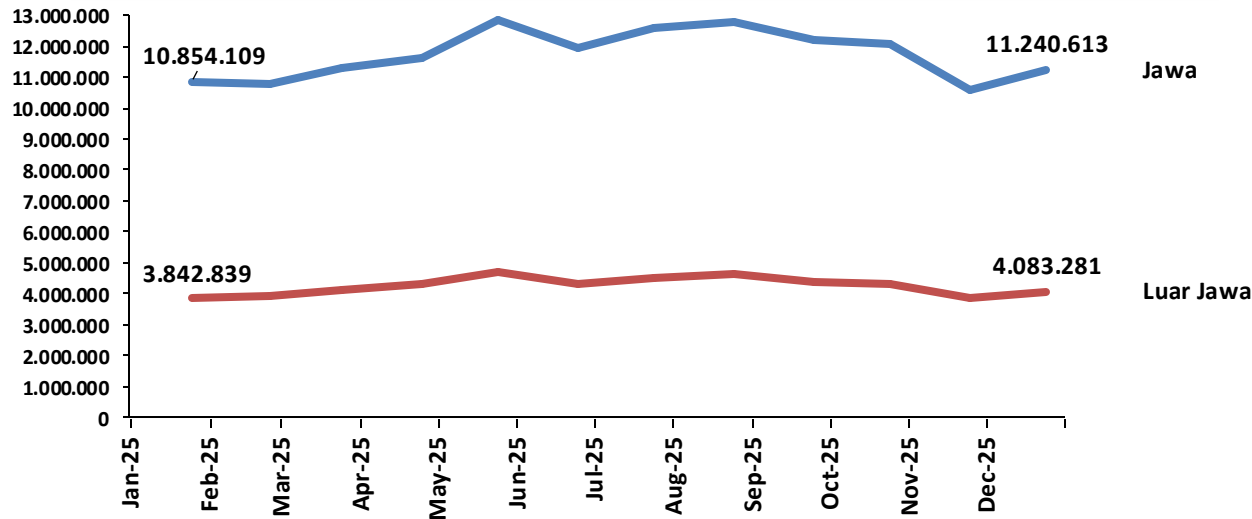
- *Outstanding* pembiayaan P2P lending menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten sepanjang 2025 hingga 2026, namun pertumbuhan ini diiringi lonjakan tajam TWP-90. Lonjakan risiko kredit macet ini utamanya dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat dan dinamika perekonomian yang menekan kemampuan bayar *borrower*.
- Porsi penyaluran ke sektor produktif masih jauh lebih kecil dibandingkan sektor konsumtif. Hal ini sejalan dengan temuan OJK bahwa penyelenggara dengan TWP90 di atas 5% mayoritas beroperasi di sektor produktif. Hal ini disebabkan portofolio pembiayaan produktif yang masih relatif kecil sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi kredit macet. Implikasinya, penyelenggara cenderung lebih berhati-hati menyalurkan ke sektor ini.

Tiga dari empat rupiah pindar mengalir ke Jawa; Perempuan dan badan usaha menjadi motor pertumbuhan

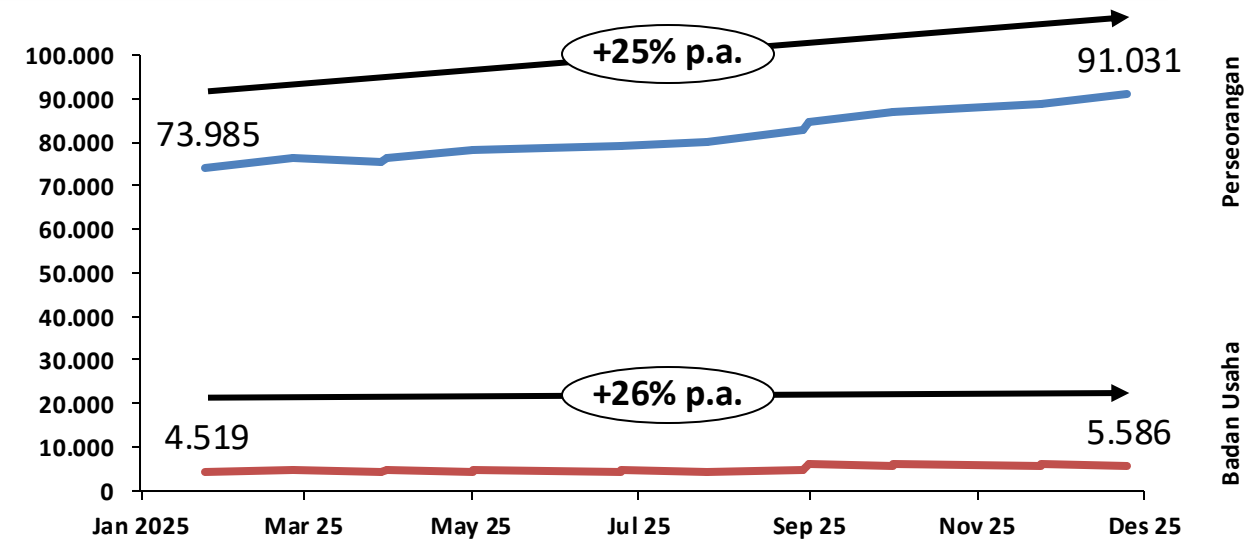
INDEF

Pertumbuhan pindar nyata, tetapi belum menjadi alat pemerataan antarwilayah. Tantangannya terdapat pada perluasan ke luar Jawa menuntut adanya akselerasi literasi keuangan dan infrastruktur digital.

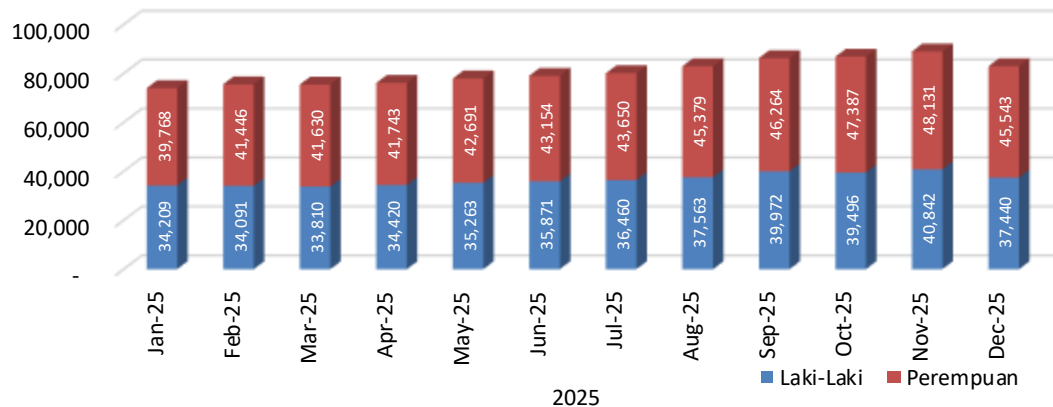
Tren Penyaluran Fintech Berdasarkan Lokasi (Miliar)



Tren Penyaluran Fintech Perseorangan & Badan Usaha (Miliar)



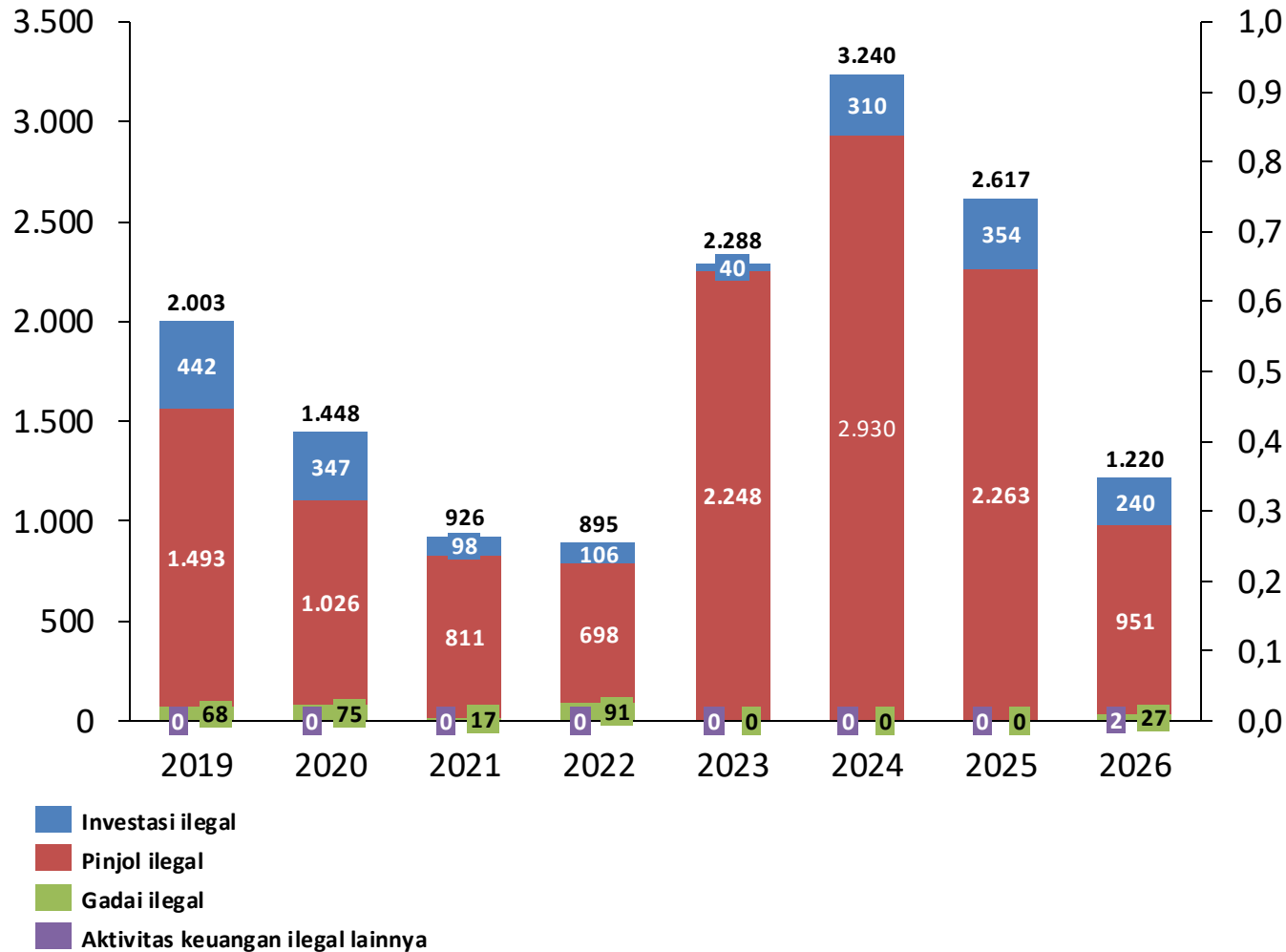
Tren Penyaluran Fintech Berdasarkan Gender (Miliar)



- Penyaluran P2P *lending* masih sangat terkonsentrasi di Jawa, sejalan dengan indeks inklusi keuangan Jawa (0,88) yang jauh lebih tinggi dibanding luar Jawa (0,78). Jawa juga satu-satunya wilayah berstatus *overbank*, sehingga ketimpangan infrastruktur perbankan fisik turut menghambat pemerataan akses P2P *lending* di luar Jawa.
- Borrower* perempuan konsisten mendominasi penyaluran P2P *lending* sepanjang 2025, sejalan dengan temuan OJK bahwa *outstanding* pembiayaan ke perempuan mendominasi total pembiayaan perorangan, mengindikasikan pola ini bersifat struktural, bukan fluktuasi musiman.
- Outstanding* untuk perseorangan dan badan usaha sama-sama tumbuh konsisten, dengan segmen badan usaha tumbuh sedikit lebih cepat meski basis nominalnya kecil, sejalan dengan dorongan OJK memperbesar porsi pembiayaan produktif ke UMKM melalui *Roadmap LPBBTI 2023-2028*.

Isu Terkini: Pinjol Ilegal Masih Marak

Fintech mendominasi pengaduan konsumen OJK dengan 25.443 aduan, sementara pinjol ilegal menjadi entitas ilegal paling banyak diadukan dengan 22.394 kasus sepanjang 2026



- Praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal tetap marak dan sulit diberantas secara tuntas. Hal ini salah satunya disebabkan rendahnya *barrier to entry* dalam pembuatan platform ilegal, dengan estimasi kemunculan hingga dua platform baru per hari, sementara entitas yang telah ditindak kerap muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.
- Dari sisi permintaan, persistensi pinjol ilegal turut didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan instan tanpa persyaratan administratif yang kompleks. Hal tersebut diperparah oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah serta kecenderungan sebagian masyarakat memanfaatkan pinjaman untuk konsumsi non-esensial.
- Kondisi ini menciptakan basis permintaan yang tetap besar dan menjadikan pasar pinjol ilegal masih besar.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2026)

Banding Denda KPPU

- KPPU menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pindar yang divonis melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999 terkait penetapan suku bunga, dengan total denda mencapai Rp755 miliar.
- Perusahaan pindar mengajukan banding pada 14 April 2026. AFPI menilai penetapan batas maksimum manfaat ekonomi merupakan bentuk perlindungan konsumen sesuai arahan OJK.
- Hingga Agustus 2026, mayoritas penyelenggara masih menempuh keberatan di pengadilan niaga.
- OJK harus bertanggung jawab memberikan kepastian hukum dan kebijakan bagi penyelenggara pindar di Indonesia.

POJK 8/2026

- Terbit 5 Agustus 2026, mengatur pelaporan dan permintaan data transaksi pendanaan penyelenggara pindar.
- Data transaksi wajib dilaporkan harian melalui Pusdafil dan *Fintech Data Center* (FDC).
- Penyelenggara wajib menunjuk direksi penanggung jawab pelaporan serta menjalankan audit internal secara berkala.
- Penyelenggara dan asosiasi dilarang memperjualbelikan informasi pengguna dengan ancaman sanksi administratif.
- Pengawasan bergeser ke basis data harian sehingga tekanan kualitas kredit terbaca lebih cepat.
- Namun, bagi penyelenggara yang masih berskala kecil, beban kepatuhan menjadi lebih besar.

Pindar Bermasalah

- Per Mei 2026, terdapat 18 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen dan 8 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar.
- Secara agregat, TWP90 industri pindar masih berada di kisaran 4 persen lebih sejak awal tahun meski jumlah penyelenggara bermasalah berfluktuasi, sempat naik ke 19 pada April 2026 sebelum turun ke 18 pada Mei.
- OJK harus mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara pindar yang tidak memenuhi ketentuan dan berisiko tinggi untuk memastikan adanya perlindungan konsumen yang kuat dan ekosistem industri pindar yang sehat.

1.

Pelemahan Daya Beli dan Kenaikan Suku Bunga Acuan

Dari Januari hingga Juli 2026, Indeks Keyakinan Konsumen turun lebih dari 10 poin, dan Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil juga turun hampir 5 poin persentase. Di sisi lain, BI Rate naik 100 bps dalam tiga bulan terakhir menjadi 5,75% membuat masyarakat menahan konsumsi dan beban cicilan makin berat.

2.

Kredit Bank Melaju, UMKM Tertinggal

Pertumbuhan kredit perbankan terus terakselerasi menjadi 12,75%. Namun, kredit UMKM hanya tumbuh 1,21%. Selain itu, rasio rekening kredit UMKM terhadap total rekening kredit terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa bank semakin selektif terhadap UMKM akibat risiko kredit yang lebih tinggi.

3.

Tantangan Skema Penyaluran Kredit ke UMKM

Outstanding P2P lending tumbuh 23% sepanjang 2025, tetapi TWP-90 melonjak ke 4.32% dan penyaluran semakin condong ke sektor konsumtif. Fungsi *P2P lending* sebagai instrumen pembiayaan produktif bagi UMKM kian tergerus.

4.

Persoalan Tata Kelola Pindar

Lonjakan TWP 90 dan perusahaan pindar yang belum memenuhi ketentuan menuntut ketegasan OJK. Di sisi lain, makin tingginya kredit konsumtif, masih maraknya pinjol ilegal, serta denda KPPU terhadap perusahaan pindar mengharuskan adanya akselerasi perbaikan tata kelola pindar.

1.

Beri Stimulus Ke Sisi Permintaan Masyarakat

Pelemahan daya beli menghambat ekspansi UMKM. Pemerintah harus meningkatkan pendapatan riil masyarakat agar uangnya dapat dibelanjakan oleh konsumen, termasuk di UMKM. Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah di antaranya adalah penurunan PPN dan program padat karya.

2.

Insentif Penyaluran Kredit ke UMKM

Bank memiliki kapasitas untuk menyalurkan kredit, namun semakin mengurangi penyaluran kredit ke UMKM. Maka, beberapa kebijakan yang dapat ditempuh adalah perluasan skema penjaminan kredit bagi UMKM dan diferensiasi insentif yang lebih nyata bagi bank kelas menengah-kecil (KBMI 1-2) untuk mendorong penyaluran kredit ke UMKM.

3.

Penyederhanaan Skema Penyaluran Kredit ke UMKM

Arah penyederhanaan dapat berupa percepatan *Service Level Agreement* (SLA) pencairan kredit, distribusi kuota kredit yang lebih dinamis antardaerah, pemangkasan dokumen persyaratan serta verifikasi, dan pendampingan peningkatan literasi keuangan bagi UMKM secara lebih intensif.

4.

Penguatan Tata Kelola Pindar

Beberapa hal di antara kebijakan yang dapat diambil adalah ambang batas TWP-90 yang sanksinya mengikat secara otomatis ketika melewati ambang batas, penegakan ekuitas minimum dan pinjol ilegal secara lebih tegas, pemberian insentif ke kredit produktif, serta akselerasi perluasan literasi keuangan ke luar Pulau Jawa.

- Abigail, P. Y. D. (2026). *Bank Kembali Gas Kredit, Sektor Produktif Jadi Incaran Utama*. Bisnis Indonesia Grup. <https://finansial.bisnis.com/read/20260720/90/1989346/bank-kembali-gas-kredit-sektor-produktif-jadi-incaran-utama>
- Al, I., Adha, F., Maulida, F., Komaria, N., & Amalia, D. Z. (2025). *Meninjau ulang kebijakan batas atas suku bunga harian pinjaman daring*. 90(1), 1-12.
- Bank Indonesia. (2026a). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2026b). *Survei Penjualan Eceran Mei 2026*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812326.aspx
- Belinda. (2026). *OJK Tetapkan Porsi Pembiayaan Fintech (P2P) Lending 40%-50% Mulai 2025*. Vibiznews. <https://vibiznews.com/index.php/2025/01/13/ojk-tetapkan-porsi-pembiayaan-fintech-p2p-lending-40-50-mulai-2025/>
- BPS. (2025). *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/05/29/057b21b35bc236c5ede9d160/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-september-2025.html>
- Chandra Dwi Pranata. (2026). *Kredit Bank Tumbuh 12,67% pada Juni 2026 Meski Suku Bunga Mulai Naik*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260722160330-17-752971/kredit-bank-tumbuh-1267-pada-juni-2026-meski-suku-bunga-mulai-naik>
- CNN. (2026). *BI Rate Naik 25 Bps Lagi Jadi 5,75% Persen per 18 Juni*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260618143411-78-1370442/bi-rate-naik-25-bps-lagi-jadi-575-persen-per-18-juni>
- Dharma, R. R., & Rokhim, R. (2025). *ANALISIS FINTECH LENDING TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN INKLUSI KEUANGAN SEBAGAI*. 14(03), 1349-1361.
- Hasanah, U. (2026). *Kesenjangan Digital Hambat Inklusi Keuangan, Fintech Berpotensi Jadi Solusi*. Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read562788/kesenjangan-digital-hambat-inklusi-keuangan-fintech-berpotensi-jadi-solusi>
- Hasiana, D. (2026). *UMKM Ungkap Alasan Pinjol Lebih Menggiurkan Ketimbang KUR*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/14192/umkm-ungkap-alasan-pinjol-lebih-menggiurkan-ketimbang-kur>
- Huda, N., & Muhammad, G. D. (2026). *Konfigurasi Ulang Fintech P2P Lending*. CNBC Indone. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240423142721-14-53265https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240423142721-14-532655/konfigurasi-ulang-fintech-p2p-lending5/konfigurasi-ulang-fintech-p2p-lending>

- Huda, N., & Muhammad, G. D. (2026). *Konfigurasi Ulang Fintech P2P Lending*. CNBC Indone. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240423142721-14-53265https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240423142721-14-532655/konfigurasi-ulang-fintech-p2p-lending5/konfigurasi-ulang-fintech-p2p-lending>
- Irawati. (2026). *OJK Beri Sinyal Ada 2-3 Bank Naik Kelas ke KBMI 4 Tahun Ini*. Infobanknews.Com. <https://infobanknews.com/ojk-beri-sinyal-ada-2-3-bank-naik-kelas-ke-kbmi-4-tahun-ini>
- Kredit Usaha Rakyat 2025 Cetak Kinerja Solid, Seluruh Kredit Program Pemerintah Siap Take-off di Tahun 2026, (2026). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6678/kredit-usaha-rakyat-2025-cetak-kinerja-solid-seluruh-kredit-program-pemerintah-siap-take-off-di-tahun-2026>
- Khaerunnisa, R. (2026). *OJK catat kredit industri perbankan capai Rp8.918 triliun per Mei 2026*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/5639169/ojk-catat-kredit-industri-perbankan-capai-rp8918-triliun-per-mei-2026>
- Khoiriyah, A. B. (2026). *Kredit Macet Fintech Kredit Macet Fintech P2P Lending Masih Mengkhawatirkan Capai 4,32 Persen*. Berita Kini. <https://bisnis.beritakini.co.id/detail/794143/kredit-macet-fintech-p2p-lending-masih-mengkhawatirkan-capai-432-persen>
- Kompas. (2026). *Meski Tumbuh, Pembiayaan UMKM Kian Menjauh dari Target*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/meski-tumbuh-kredit-umkm-menjauh-dari-target>
- Kontan. (2026). *Kredit Macet UMKM Naik Jadi 4,54%, Bank Diminta Selektif Bersihkan Kredit Bermasalah*. Kontan. https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-umkm-naik-jadi-454-bank-diminta-selektif-bersihkan-kredit-bermasalah#goog_rewarded
- Lentera Esai. (2026). *OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,49 Persen pada Maret 2026*. Lentera Esai. <https://lenteraesai.id/2026/05/07/ojk-catat-kredit-perbankan-tumbuh-949-persen-pada-maret-2026/>
- Mayasari, S. (2026). *Kredit UMKM Diproyeksi Masih Menantang pada 2026, Bank Selektif Salurkan Pembiayaan*. Kontan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-umkm-diproyeksi-masih-menantang-pada-2026-bank-selektif-salurkan-pembiayaan>
- OJK. (2025a). *Statistik Fintech*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
- OJK. (2025b). *Statistik Informasi Perkreditan*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-informasi-perkreditan/default.aspx>

- OJK. (2025c). *Statistik Perbankan Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>
- OJK. (2026a). *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Juli-2026.aspx>
- OJK. (2026b). *Survei Konsumen* (Vol. 7, Issue Grafik 2). <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Maret-2026.pdf>
- PERBANAS. (2026). *OJK Soroti Pergeseran Pembiayaan ke Segmen Mikro*. PERBANAS. <https://perbanas.org/publikasi/berita-perbanas/ojk-soroti-pergeseran-pembiayaan-ke-segmen-mikro>
- Puspita, D. (2026). *Kredit UMKM Perbankan Tumbuh Tipis Ditopang Sektor Mikro*. Babel. https://www.babelinsight.id/kredit-umkm-perbankan-tumbuh-ditopang-mikro#google_vignette
- Saputra, F. (2026). *16 Fintech Lending Memiliki Angka TWP90 di Atas 5% per Juni 2026*. Kontan. https://keuangan.kontan.co.id/news/16-fintech-lending-memiliki-angka-twp90-di-atas-5-per-juni-2026#goog_rewarded
- Untari, P. H. (2026). *Outstanding Pinjaman di Fintech P2P Lending Tembus Rp78,50 Triliun per Januari 2025*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20250305/89/1845117/outstanding-pinjaman-di-fintech-p2p-lending-tembus-rp7850-triliun-per-januari-2025>



Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta.

Aktivitas INDEF di antaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF diharapkan dapat menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi, dan meningkatkan kepekaan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah “Mewujudkan Kebijakan Publik di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Selama lebih dari 30 tahun, INDEF telah menjadi institusi yang berperan aktif dalam membentuk kebijakan ekonomi di Indonesia. INDEF memiliki 4 fokus utama, yaitu kajian ekonomi strategis, pendorong reformasi kebijakan, publikasi dan media, kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan BUMN, serta pengembangan SDM.

Terima kasih

Center of Digital Economy and SMEs
Institute for Development of Economics and Fina

 indef@indef.or.id

 <http://indef.or.id>